

DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ISU VIRAL: ANTARA RESPONS DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Anggara Setya Saputra^{1*}, Denok Kurniasih², Devit Bagus Indranika³

^{1,2} Doktor Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman

³ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

*Korespondensi : setya.saputra@mhs.unsoed.ac.id

ABSTRAK

Dalam era digital, isu-isu viral sering kali memengaruhi dinamika kebijakan publik di Indonesia. Pemerintah dihadapkan pada tekanan untuk merespons isu yang berkembang secara cepat di media sosial, baik dalam bentuk pembuatan kebijakan baru maupun penyesuaian kebijakan yang sudah ada. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana isu viral memengaruhi proses perumusan, respons, dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Dengan menggunakan metode *literature review*, penelitian ini mengkaji berbagai sumber akademik, laporan kebijakan, serta kasus-kasus kebijakan yang dipengaruhi oleh isu viral. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun respons pemerintah terhadap isu viral cenderung cepat, tantangan dalam implementasi kebijakan tetap menjadi kendala utama, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, resistensi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengelola kebijakan publik agar respons terhadap isu viral tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Isu Viral, Respons Pemerintah, Implementasi Kebijakan, Media Sosial.

ABSTRACT

In the digital era, viral issues often influence the dynamics of public policy in Indonesia. The government is faced with pressure to respond to issues that develop rapidly on social media, both in the form of creating new policies and adjusting existing policies. This study aims to analyze how viral issues influence the process of formulating, responding to, and implementing public policy in Indonesia. Using the literature review method, this study examines various academic sources, policy reports, and policy cases influenced by viral issues. The results of the study show that although the government's response to viral issues tends to be fast, challenges in policy implementation remain the main obstacles, such as lack of coordination between agencies, community resistance, and limited resources. Therefore, a more systematic approach is needed in managing public policy so that the response to viral issues is not only reactive, but also strategic and sustainable.

Keywords : Public Policy, Viral Issues, Government Response, Policy Implementation, Social Media.

A. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi alat utama bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, membangun opini publik, serta menekan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Di Indonesia, fenomena isu viral semakin sering mempengaruhi kebijakan publik, baik dalam bentuk regulasi, peraturan, maupun keputusan ad hoc yang diambil oleh pemerintah dalam menanggapi tekanan publik. Isu-isu yang muncul seringkali berkembang secara masif dalam waktu singkat dan memaksa pengambil kebijakan untuk memberikan respons cepat guna menghindari ketidakstabilan politik dan sosial.

Indonesia memiliki 139 juta identitas pengguna media sosial pada Januari 2024, yang setara dengan 49,9% dari total populasi (We Are Social & Data Reportal, 2024). Sementara itu, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 185,3 juta, dengan penetrasi sebesar 66,5%. Pengguna media sosial di Indonesia menghabiskan rata-rata 3 jam 11 menit per hari untuk mengakses platform tersebut (Andi Link, 2024). Platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia pada Januari 2024 adalah WhatsApp (90,9% pengguna internet), diikuti oleh Instagram (85,3%), Facebook (81,6%), dan TikTok (73,5%) (Katadata, 2024). Karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas menjadikan isu-isu tertentu dapat menjadi viral dalam waktu singkat. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam ranah hiburan atau sosial, tetapi juga dalam konteks kebijakan publik, di mana desakan masyarakat yang masif seringkali mendorong pemerintah untuk mengambil

tindakan segera.

Fenomena kebijakan yang didasarkan pada respons terhadap isu viral dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bersikap responsif terhadap aspirasi publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi darurat. Namun, di sisi lain, kebijakan yang terlalu cepat diambil tanpa kajian mendalam dapat menimbulkan masalah baru atau tidak menyelesaikan akar permasalahan. Seperti halnya contoh kasus pada tahun 2023, pemerintah berencana menerapkan pajak atas penggunaan media sosial, yang dikenal sebagai pajak *Over-The-Top* (OTT). Kebijakan ini menuai protes dari masyarakat, terutama pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), karena dianggap memberatkan dan dapat membatasi akses informasi. Desakan masyarakat melalui media sosial berhasil mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Sebagai contoh, Uganda pernah menerapkan pajak serupa pada tahun 2018, namun akhirnya dihapus karena gagal meningkatkan pendapatan dan membatasi penggunaan internet (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Contoh lain, pemerintah berencana menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023 untuk menata ulang sistem kepegawaian. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya pengangguran dan berdampak pada pelayanan publik. Kritik luas di platform digital mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. MPR meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan penghapusan tenaga honorer, mengingat potensi persoalan yang bakal

muncul, terutama pengangguran dari tenaga honorer (Hukum Online, 2023). Selain itu, pemerintah menunda kebijakan penghapusan tenaga honorer untuk mencari solusi yang lebih baik.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa respons pemerintah terhadap isu viral dapat menghasilkan perubahan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Namun, penting bagi pemerintah untuk tetap melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan, agar kebijakan yang dihasilkan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru.

Kebijakan yang diambil secara reaktif terhadap isu viral seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya perencanaan yang matang, sehingga kebijakan yang dihasilkan berpotensi mengalami hambatan dalam penerapan di lapangan. Hal ini terlihat dalam kasus penutupan sementara perusahaan sawit yang viral akibat laporan investigasi mengenai pelanggaran lingkungan. Meskipun kebijakan tersebut mendapat dukungan publik, dalam praktiknya banyak perusahaan yang hanya mengalami sanksi administratif sementara tanpa ada pengawasan lebih lanjut.

Selain itu, kebijakan yang dibuat akibat tekanan isu viral seringkali mengabaikan aspek legalitas dan kesiapan infrastruktur dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi regulasi, tumpang tindih dengan kebijakan sebelumnya, atau bahkan berpotensi melanggar hukum yang lebih tinggi. Misalnya, kebijakan pembatasan impor produk pangan yang dikeluarkan secara tiba-tiba sebagai respons terhadap gerakan boikot produk asing di media sosial dapat menimbulkan dampak ekonomi yang lebih

luas, seperti kenaikan harga bahan pokok dan terganggunya rantai pasokan nasional.

Faktor lain yang mempengaruhi dinamika kebijakan publik di Indonesia adalah adanya intervensi dari berbagai pihak, baik aktor politik, kelompok kepentingan, maupun organisasi internasional (Rohman, 2024). Ketika sebuah isu viral menjadi perhatian nasional, seringkali muncul berbagai kepentingan yang berusaha mempengaruhi arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Suci & Nabila, 2022). Hal ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam proses pengambilan keputusan, karena kebijakan yang dihasilkan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tekanan dari masyarakat, kebutuhan ekonomi, serta hubungan diplomatik dengan negara lain.

Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) agar kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar merespons tekanan publik, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dan dapat diimplementasikan dengan baik. Kepemimpinan adaptif menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (KemenPANRB, 2024). Selain itu tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan inovatif harus berlandaskan data serta bukti konkret agar lebih efektif dan tepat sasaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 2024). Dengan keterlibatan aktif para ahli dan akademisi dalam proses perumusan kebijakan serta koordinasi yang lebih erat antar lembaga pemerintah, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih terarah, tidak tumpang tindih, dan mampu menjawab tantangan yang ada secara

efektif.

Pemerintah perlu membangun sistem komunikasi yang lebih transparan dengan masyarakat, sehingga informasi terkait kebijakan yang diambil dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan mispersepsi. Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan juga akan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mengurangi potensi penyebaran disinformasi yang dapat memperburuk situasi.

Secara keseluruhan, dinamika kebijakan publik di Indonesia di tengah isu viral mencerminkan tantangan yang kompleks antara respons cepat terhadap tekanan masyarakat dan implementasi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih holistik dalam perumusan kebijakan agar tidak hanya sekadar reaktif, tetapi juga mampu memberikan solusi jangka panjang yang berdampak positif bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya meredakan gejala sesaat, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review atau tinjauan pustaka, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian (Snyder, 2019). Metode ini dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai publikasi ilmiah, buku, laporan penelitian, serta artikel jurnal yang kredibel dan telah terpublikasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui

basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan ProQuest, serta sumber-sumber resmi lainnya yang memiliki reputasi akademik. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian, publikasi dalam rentang waktu tertentu (misalnya, 5–10 tahun terakhir), dan keterpercayaan sumber yang diacu. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama yang muncul dalam literatur.

Sebagai upaya untuk memastikan kredibilitas hasil tinjauan pustaka, penelitian ini mengikuti prinsip-prinsip systematic literature review yang mengacu pada metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) sebagaimana dijelaskan oleh Moher et al. (2009). Pendekatan ini membantu dalam menyaring dan memilih literatur yang paling relevan serta menghindari bias dalam proses analisis.

Dengan menggunakan metode literature review, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan teori dan temuan terbaru terkait topik yang dikaji, serta memberikan dasar yang kuat bagi penelitian lebih lanjut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, isu-isu viral di media sosial memiliki dampak signifikan terhadap proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Fenomena ini memunculkan istilah "*viral-based policy*" di mana pemerintah cenderung merespons isu yang menjadi perbincangan luas di masyarakat. Namun, pendekatan semacam ini menimbulkan pertanyaan

mengenai efektivitas dan tantangan dalam implementasinya.

Fenomena *viral-based policy* di Indonesia mencerminkan bagaimana isu-isu yang ramai diperbincangkan di media sosial dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Kebijakan semacam ini sering kali muncul sebagai respons cepat terhadap opini publik yang berkembang secara luas, namun menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam jangka panjang (Economica, 2023). Beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan berbasis viral sering terjadi di Indonesia antara lain reaksi spontan pemerintah terhadap isu yang sedang trending, kurangnya kajian yang mendalam sebelum implementasi kebijakan, serta ketergantungan pada opini media sosial dalam menentukan prioritas kebijakan (Fitriani, 2023). Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat yang lebih luas menjadi penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada reaksi spontan terhadap isu viral, melainkan juga berdasarkan perencanaan yang matang dan keterlibatan warga dalam proses perumusan kebijakan (Magdalene, 2023). Selain itu, muncul pula perdebatan mengenai apakah respons pemerintah terhadap isu viral mencerminkan bentuk demokrasi yang sehat atau justru memperlihatkan lemahnya sistem pengambilan keputusan yang berbasis kajian dan analisis yang komprehensif (Kompas, 2022). Dengan demikian, fenomena ini menyoroti perlunya keseimbangan antara respons cepat pemerintah terhadap opini publik dan pembuatan kebijakan yang berbasis data serta kajian yang lebih mendalam.

Indonesia meluncurkan sistem pajak baru yang dikenal sebagai "core tax" dengan tujuan meningkatkan efisiensi

administrasi pajak. Namun, implementasi sistem ini menghadapi berbagai masalah, termasuk gangguan sistem dan ketidakcocokan data, yang mengakibatkan keluhan dari pengguna dan gangguan operasi bisnis. Sebagai respons, pemerintah memutuskan untuk kembali menggunakan sistem lama sambil memperbaiki sistem baru. Kasus ini menggambarkan tantangan dalam implementasi kebijakan baru tanpa persiapan dan uji coba yang memadai.

1. Respons Pemerintah terhadap Isu Viral

Pemerintah Indonesia sering kali menunjukkan respons cepat terhadap isu-isu yang viral di media sosial. Hal ini disebabkan oleh tekanan publik yang kuat dan kebutuhan untuk menjaga citra positif di mata masyarakat. Namun, respons yang terburu-buru tanpa perencanaan yang matang dapat menimbulkan masalah baru. Sebagai contoh, fenomena "*viral-based policy*" sering terjadi ketika pemerintah mengubah atau mencabut kebijakan setelah mendapatkan tekanan dari masyarakat melalui media sosial. Meskipun pendekatan ini menunjukkan responsivitas pemerintah, hal ini juga mencerminkan kurangnya perencanaan yang matang dan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan (IDN Times, 2023).

Sebagai contoh, dalam kasus pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia merespons dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kemudian beralih ke kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Respons ini didasarkan pada tren penyebaran informasi terkait COVID-19 yang sangat cepat di media sosial. Contoh lain adalah kebijakan terhadap penyebaran hoaks yang sering kali menjadi isu viral. Pemerintah melalui

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran terhadap berita hoaks serta memberikan klarifikasi melalui situs resmi dan media sosial.

2. Tantangan Implementasi Kebijakan Publik dalam Konteks Isu Viral

1) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Indonesia yang hierarkis dan terfragmentasi sering kali menjadi kendala dalam implementasi kebijakan publik. Banyaknya kementerian, lembaga, dan dinas yang memiliki tugas serta kewenangan serupa menyebabkan tumpang tindih kebijakan serta inefisiensi dalam koordinasi antarinstansi (Seputar Birokrasi, 2025). Situasi ini menciptakan birokrasi yang lamban dan kurang responsif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan yang memerlukan kerja sama lintas sektor.

Tumpang tindih kewenangan antar lembaga menyebabkan inefisiensi, birokrasi yang berbelit, serta potensi konflik antarinstansi. Hal ini juga berdampak pada pemborosan anggaran akibat adanya duplikasi pekerjaan di berbagai instansi pemerintah (Banten Intens, 2025). Sebagai contoh, dalam kebijakan lingkungan, beberapa lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pemerintah daerah memiliki peran yang saling berkaitan. Namun, karena kurangnya koordinasi yang efektif, implementasi kebijakan menjadi terhambat dan sering kali terjadi perbedaan kebijakan antarinstansi.

Tumpang tindih kebijakan juga terlihat dalam sektor pengelolaan sumber daya alam dan kelautan. Ketidakjelasan

regulasi yang diakibatkan oleh peraturan yang saling tumpang tindih sering menyebabkan ketidakefektifan dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Akibatnya, upaya konservasi atau eksploitasi sumber daya menjadi tidak terkoordinasi dengan baik dan sering kali tidak berjalan sesuai harapan (PIMA, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa perbaikan dalam struktur birokrasi, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun bisa mengalami kegagalan dalam implementasi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi birokrasi yang lebih optimal agar birokrasi dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan penataan struktur birokrasi, yaitu penyempurnaan tugas, fungsi, serta prosedur kerja organisasi pemerintahan guna menghindari tumpang tindih kebijakan (LPKN, 2023). Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih sederhana, responsif, dan inovatif sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal serta mendukung kebijakan yang lebih efisien dan efektif.

2) Dinamika Politik

Dinamika politik di Indonesia mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Negosiasi politik yang berkepanjangan dan agenda masing-masing partai politik dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang efektif. Selain itu, kebijakan publik sering kali digunakan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan politik tertentu, yang dapat mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas.

Dinamika politik di Indonesia memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan, tetapi sering kali menjadi hambatan akibat negosiasi politik

yang berkepanjangan dan kepentingan partai politik. Sistem multipartai di Indonesia menyebabkan proses legislasi yang kompleks, di mana keputusan kebijakan sering kali tertunda karena tarik-menarik kepentingan antar partai (Liddle & Mujani, 2019). Selain itu, partai politik cenderung memprioritaskan agenda mereka sendiri, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih bersifat populis untuk kepentingan elektoral dibandingkan berbasis kebutuhan publik jangka panjang (Aspinall, 2020). Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana kebijakan sering kali digunakan sebagai alat politik untuk menguntungkan kelompok tertentu, terutama elite ekonomi dan politik yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan (Hadiz, 2017). Akibatnya, kebijakan publik berisiko tidak efektif dan kurang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, sehingga diperlukan reformasi dalam mekanisme pengambilan kebijakan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

3) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan data dan informasi yang akurat. Namun, di Indonesia, akses terhadap data yang andal masih menjadi tantangan. Kurangnya data yang terintegrasi antarinstansi dapat menyebabkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan menghambat implementasi yang efektif.

Implementasi kebijakan yang efektif sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi. Namun, di Indonesia, masih terdapat kendala dalam akses dan kualitas data antarinstansi, yang berakibat pada kebijakan yang kurang tepat sasaran (Bappenas, 2022). Salah satu faktor utama adalah fragmentasi data, di mana

setiap lembaga memiliki sistem pengelolaan data sendiri tanpa adanya standar yang seragam, sehingga menyulitkan koordinasi dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (World Bank, 2020). Selain itu, kurangnya transparansi dan keterbukaan dalam penyediaan data publik juga menjadi hambatan bagi pemangku kepentingan dalam memanfaatkan informasi secara optimal (Pemerintah Indonesia, 2023). Dampak dari ketidakterpaduan data ini terlihat dalam berbagai sektor, seperti penyaluran bantuan sosial yang sering kali tidak akurat akibat perbedaan data kependudukan dan ekonomi yang digunakan oleh berbagai instansi (World Bank, 2020). Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah menginisiasi program Satu Data Indonesia yang bertujuan menyelaraskan sumber data antarinstansi agar lebih terintegrasi dan dapat diakses secara lebih luas (Pemerintah Indonesia, 2023). Jika diterapkan dengan baik, kebijakan berbasis data yang solid dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di berbagai sektor pembangunan (Bappenas, 2022).

4) Budaya Kerja

Budaya kerja di banyak lembaga pemerintahan yang cenderung menghindari risiko dan rendahnya inisiatif individu dapat memperlambat implementasi kebijakan. Praktik "asal selamat" di kalangan birokrat membuat mereka lebih memilih mengikuti prosedur yang kaku daripada mencari solusi inovatif.

Budaya kerja di lembaga pemerintahan yang cenderung menghindari risiko dan minim inisiatif individu dapat memperlambat implementasi kebijakan, karena birokrat lebih memilih mengikuti prosedur yang kaku daripada mencari solusi inovatif (Lipsky, 1980). Sikap ini berakar

pada *uncertainty avoidance* yang tinggi dalam budaya organisasi di Indonesia, di mana pegawai cenderung menghindari kesalahan dan lebih fokus pada kepatuhan terhadap aturan daripada mengambil langkah kreatif yang dapat mempercepat reformasi kebijakan (Hofstede, 2001). Selain itu, konsep *path dependency* menjelaskan bagaimana birokrasi sering kali mempertahankan pola kerja lama meskipun ada peluang untuk perubahan yang lebih efektif, sehingga inovasi dalam kebijakan publik menjadi lambat (Pierson, 2000). Untuk mengatasi tantangan ini, reformasi birokrasi berbasis kinerja dan pemberian insentif bagi pengambilan risiko yang terukur diperlukan agar pegawai lebih terdorong untuk berinovasi dalam menjalankan kebijakan (World Bank, 2020).

5) Transparansi

Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan, mereka cenderung menolak atau memprotes kebijakan yang dihasilkan, sehingga memperlambat implementasi.

Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya menyebabkan resistensi terhadap kebijakan yang dihasilkan. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, mereka cenderung menolak atau bahkan memprotes kebijakan tersebut, sehingga menghambat implementasi dan efektivitasnya (OECD, 2022). Selain itu, studi dari Transparency International (2021) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat transparansi yang tinggi

cenderung memiliki tingkat kepatuhan masyarakat yang lebih baik terhadap kebijakan publik. Partisipasi yang rendah dalam perumusan kebijakan juga dapat menyebabkan kurangnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap keputusan pemerintah, yang berakibat pada penundaan atau bahkan kegagalan kebijakan (Fung, 2006). Oleh karena itu, transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam meningkatkan legitimasi serta efektivitas implementasi kebijakan publik (World Bank, 2020).

D. KESIMPULAN

Isu-isu viral di era digital memiliki *impact* dalam dinamika kebijakan publik di Indonesia. Meskipun pemerintah cenderung merespons isu-isu tersebut dengan cepat, berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, resistensi masyarakat, dan keterbatasan sumber daya, masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu memberikan solusi jangka panjang yang efektif.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Ketika suatu isu viral muncul dan menimbulkan reaksi publik yang besar, pemerintah sering kali tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk merespons situasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan, terutama jika berbagai lembaga pemerintah tidak memiliki koordinasi yang baik. Akibatnya, kebijakan yang dibuat mungkin tidak terintegrasi dengan baik dan berisiko menimbulkan

tumpang tindih atau inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antarinstansi agar kebijakan yang diambil dapat berjalan secara harmonis dan efisien.

Selain itu, resistensi masyarakat juga menjadi faktor yang sering kali menghambat efektivitas kebijakan yang dirumuskan sebagai respons terhadap isu viral. Tidak semua kebijakan yang dihasilkan dari tekanan publik di media sosial mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang diambil secara cepat justru menimbulkan kontroversi baru atau mendapat penolakan dari kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan yang dibuat secara reaktif sering kali tidak melalui proses konsultasi yang mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang lebih partisipatif dalam merumuskan kebijakan, dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan dapat diterima oleh berbagai pihak.

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan yang dibuat sebagai respons terhadap isu viral. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang diambil dengan cepat tidak diiringi dengan alokasi sumber daya yang memadai untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Akibatnya, kebijakan tersebut mungkin tidak berjalan dengan efektif atau bahkan gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melakukan perencanaan yang lebih matang dalam hal

alokasi sumber daya, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan optimal dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Link. (2024). *Hootsuite & We Are Social: Data Digital Indonesia 2024*. Diakses pada 11 Maret 2025, dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024>
- Aspinall, E. (2020). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. (2024). *BSKDN Prioritaskan Adaptasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Antara News. Diakses pada 11 Maret 2025, dari <https://www.antarane.ws.com/berita/4608874/bskdn-prioritaskan-adaptasi-inovasi-dalam-tata-kelola-pemerintahan>
- Banten Intens. (2025). *Permasalahan Birokrasi di Indonesia dan Solusinya*.
- Bappenas. (2022). *Laporan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Data Reportal. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. Diakses pada 11 Maret 2025, dari <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Pengguna Media Sosial Dikenakan Pajak? Sini Teliti Kembali!*. Diakses pada 11 Maret 2025, dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pengguna-media-sosial-dikenakan-pajak-sini-teliti-kembali>
- Economica.id. (2023). *Viral-Based Policy:*

- Realita Disfungsi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Retrieved from <https://economica.id>
- Fitriani, A. N. (2023). Kenapa Viral Based Policy Sering Terjadi di Indonesia? IDN Times. Diakses pada 11 Maret 2025, dari <https://www.idntimes.com/life/inspiration/annisa-nur-fitriani-1/kenapa-viral-based-policy-sering-terjadi-di-indonesia>
- Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. *Public Administration Review*, 66(S1), 66-75.
- Hadiz, V. R. (2017). *Reinventing Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. Taylor & Francis.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations*. Sage Publications.
- Hukum Online. (2023). MPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer. Diakses pada 11 Maret 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mpr-minta-pemerintah-kaji-ulang-kebijakan-penghapusan-tenaga-honorer-1t62a6ed4a6aee3>
- IDN Times. (2023). Kenapa Viral-Based Policy Sering Terjadi di Indonesia? Diakses dari <https://www.idntimes.com/life/inspiration/annisa-nur-fitriani-1/kenapa-viral-based-policy-sering-terjadi-di-indonesia>
- Katadata. (2024). Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024. Databoks Katadata. Diakses pada 11 Maret 2025, dari <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66ea436ab12f2>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Pentingnya Kepemimpinan Adaptif dalam Pelayanan Publik. Diakses pada 11 Maret 2025, dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pentingnya-kepemimpinan-adaptif-dalam-pelayanan-publik>
- Kompas. (2022). Kebijakan Berbasis Viralitas, Bentuk Demokrasi di Indonesia? Diakses pada 11 Maret 2025, dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/28/kebijakan-berbasis-viralitas-bentuk-demokrasi-di-indonesia>
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2019). Indonesian democracy: From stagnation to regression?. *Journal of Democracy*, 30(4), 72-86.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- LPKN. (2023). Solusi Efektif Penataan Struktur Birokrasi di Indonesia.
- Magdalene. (2023). Jangan Tunggu Viral Dulu: Pemerintah Harus Libatkan Warga Bikin Kebijakan Publik. Diakses pada 11 Maret 2025, dari <https://magdalene.co/story/jangan-tunggu-viral-dulu-pemerintah-harus-libatkan-warga-bikin-kebijakan-publik>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*,

- 6(7), e1000097.
<https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- OECD. (2022). Enhancing Public Trust in Government Through Transparency and Citizen Engagement. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Revisi Kebijakan Pajak Digital dan Dampaknya terhadap UKM. Kementerian Keuangan.
- _____. (2023). Satu Data Indonesia: Kebijakan Integrasi Data Nasional. Jakarta: Kementerian Kominfo.
- Pierson, P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. *American Political Science Review*, 94(2), 251-267.
- Pima. (2024). Ketidakpastian Hukum Akibat Tumpang Tindih Peraturan Kelautan di Indonesia.
- Pusat Studi Kebijakan Publik. (2022). Respons Pemerintah terhadap Isu Viral dan Tantangan Regulasi. Universitas Indonesia.
- Rohman, Nur. (2024). Peran aktor dalam perumusan kebijakan publik. Wirabuana. Retrieved from <https://wirabuana.ac.id/artikel/peran-aktor-dalam-perumusan-kebijakan-publik>
- Seputar Birokrasi. (2025). Alasan Proses Kebijakan Publik di Indonesia Sering Berbelit.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suci, A, I., Nabila, A. (2022). Partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. [Setkab.go.id](https://setkab.go.id). Retrieved from <https://setkab.go.id/partisipasi-organisasi-kemasyarakatan-dalam-penyusunan-kebijakan-pemerintah>
- Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index 2021. Transparency International.
- We Are Social. (2024). Digital 2024: Global Overview Report. Retrieved from <https://wearesocial.com>
- World Bank. (2020). Improving Public Sector Performance through Innovation and Inter-Agency Collaboration. Washington, DC: World Bank.
- _____. (2020). Social Assistance in Indonesia: Assessing Targeting Accuracy. Washington, D.C.: World Bank.
- _____. (2020). The Role of Transparency in Governance and Policy Implementation. World Bank Group.